



LAPORAN KINERJA 2023

**Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna
2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, LKj adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 juga bertujuan sebagai:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas; dan
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (Penja) dan semua program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan dari 2 Sasaran Strategis, dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7,5	7,6	101,33
2	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8255	2,63	93,08
Nilai rata-rata capaian kinerja					97,21

Sebagai mana terlihat pada table diatas, pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 di peroleh hasil rata-rata capaian 97,21% kategori AA (sangat memuaskan). Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna beserta dukungan segenap pejabat dan staf/pegawai dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, disamping terjalin koordinasi, sinkronisasi baik dengan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Pusat.

Adapun Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dapat dijelaskan dari jumlah belanja langsung sebesar Rp 11.770.470.469,- dialokasikan sebesar Rp 3.597.735.590,- untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU), dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 2.455.243.884,- atau 68,24%, sedangkan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar 97,21%. Efisiensi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 sebesar 30,57%. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan belanja langsung, sehingga didapatkan hasil inefisiensi anggaran sebesar 69,43%. Jika dibandingkan dengan inefisiensi tahun 2022 yaitu sebesar 69,65 sehingga dapat disimpulkan terjadi penurunan inefisiensi sebesar -0,22%.

Ranai, 15 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah disampaikan dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Presiden No 29 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama tahun 2023, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban, Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Laporan Kinerja juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah masa mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Demikianlah laporan ini di sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dimasa yang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Ranai, 15 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Gambaran Umum	3
1.5. Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis.....	8
2.1.1. Visi dan Misi.....	9
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	11
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
2.2. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja	17
3.2. Analisis Kinerja.....	18
3.3. Analisis Keuangan.....	31
BAB IV PENUTUP.....	
4.1. Kesimpulan	33

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Struktur Organisasi Barenlitbangda.....	5
Tabel II.1	: Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Barenlitbangda.....	11
Tabel II.2	: Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
Tabel II.3	: Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
Tabel II.4	: Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung IKU	13
Tabel II.5	: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran	15
Tabel III.1	: Skala Penilaian	18
Tabel III.2	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023	18
Tabel III.3	: Kerangka Pengukuran IDSD 2023.....	21
Tabel III.4	: Skor IDSD Kabupaten Natuna 2023.....	23
Tabel III.5	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Institusi.....	24
Tabel III.6	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Infrastruktur.....	24
Tabel III.7	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Adopsi TIK.....	25
Tabel III.8	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Stabilitas Makro Ekonomi	25
Tabel III.9	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Kesehatan.....	26
Tabel III.10	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Keterampilan.....	26
Tabel III.11	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Pasar Produk.....	26
Tabel III.12	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Pasar Tenaga Kerja.....	27
Tabel III.13	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Sistem Keuangan.....	27
Tabel III.14	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Ukuran Pasar.....	27
Tabel III.15	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Dinamisme Bisnis.....	28
Tabel III.16	: Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Kapabilitas Inovasi.....	28
Tabel III.17	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 – 2022.....	30
Tabel III.18	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target akhir Renstra.....	31
Tabel III.19	: Laporan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Tahun 2023.....	32
Tabel IV.1	: Capaian Kinerja Tahunan Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 2021-2026 Tahun Anggaran 2022-2023.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	: Aspek dan Indikator Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Natuna Tahun 2023.....	19
Gambar III.2	: Metodologi Penghitungan IDSD 2023.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Perjanjian Kinerja
- Lampiran II : Pengukuran Kinerja
- Lampiran III : Tabel Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023
- Lampiran IV : Cascading Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
- Lampiran V : Lampiran Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2023 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini disusun berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 adalah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban dalam memberikan informasi kinerja instansi. Adapun tujuan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disusun ini antara lain:

01 Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

02 Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

1.4. Gambaran Umum

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16). Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian Daerah.

b. Fungsi dan kewenangan

Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan pegkajian kebijakan daerah dan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
- g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. Pelaksanaan pelayanan teknis dan administrative di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

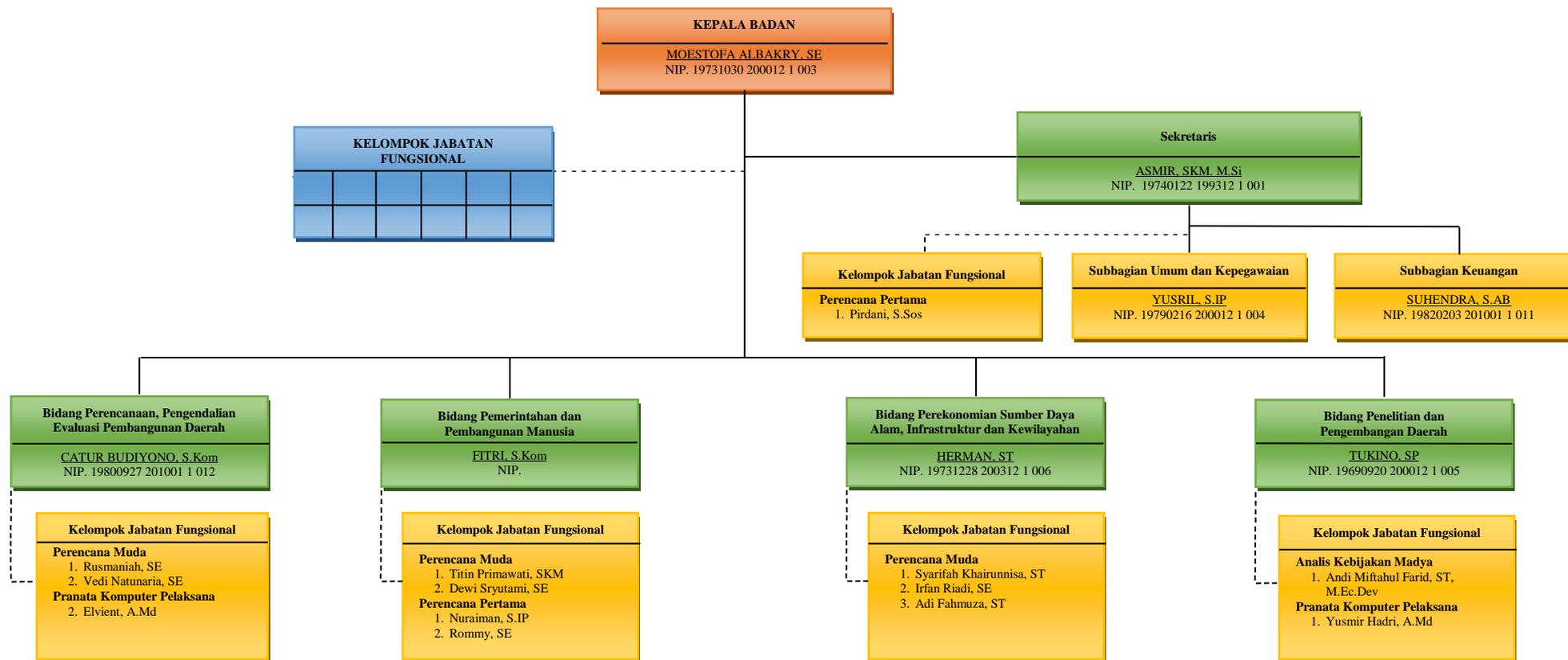
Dengan diundangkannya Peraturan Bupati Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel. I.1
Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Barenlitbangda Kabupaten Natuna Tahun 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TIPE A
 KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NATUNA
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022



KEPALA BP3D KABUPATEN NATUNA

MOESTOFA ALBAKRY, SE
 NIP. 19731030 200012 1 003

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif (Executive summary)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Tentang cara pencapaian tujuan dan sasaran penetapan kinerja tahun 2023 yang menjadi acuan pengukuran kinerja yang berarti Renstra, Rencana Kerja (Renja), dan Penetapan Kinerja.

- 2.1. Rencana Strategis
Menguraikan tentang :
 - 2.1.1. Visi dan Misi
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2. Penetapan Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang

- 3.1 Pengukuran Kinerja
- 3.2 Analisis Kinerja
- 3.3 Analisis Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Natuna.

Bagian ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntalibitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 dan menguraikan keberhasilan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja instansi serta saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

4.1 Kesimpulan

Lampiran :

- Perjanjian/Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Tabel Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023
- Cascading Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna
- Lampiran Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, yang mana Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.



Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Keputusan Kepala BP3D Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

2.1.1. Visi dan Misi

Visi

Visi yang ingin dicapai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan telaahan dari visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2021-2026 tersebut adalah sebagai berikut:

❖ **Maritim yang Unggul**

Maritim yang unggul memiliki makna bahwa Kabupaten Natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim

❖ **Eksotis**

Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Kabupaten Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata.

❖ **Aman**

Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Kabupaten Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

❖ **Kemandirian Ekonomi**

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya,

Kabupaten Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

❖ **Religius**

Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama.

❖ **Kultural**

Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan.

MISI

Misi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah:

1

Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

2

Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal

3

Menciptakan Kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis

4

Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur

5

Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan

6

Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)

7

Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terletak di misi ke 6 (enam) yaitu **“Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)”**. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki peranan dalam mewujudkan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dan terwujudnya pelayanan publik yang prima.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Natuna dijabarkan dalam Tabel II.1.

Tabel II.1
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

MISI 6 : “Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy).”			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP
	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan
		Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*corebusiness*) yang diemban.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah (PD) yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia, Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Natuna yaitu:

Tabel II.2
Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Penghitungan dari aspek proses, isi dan jaminan tindak lanjut, yang masing-masing dibuat indeks dengan menggunakan pembobotan
2	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Hasil Penghitungan Skor Nilai Indeks Daya Saing Daerah di Badan Riset Nasional (BRIN)

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja ini

disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7,5
2	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8255

Selanjutnya, sasaran strategis beserta indikator utama diuraikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran.

Tabel II.4
Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1) Pelaksanaan Konsultasi Publik
				1) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
				2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
			3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
			2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
				1) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan pelaksanaan program dan kegiatan merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas dimana pelaksanaan program dan kegiatan ini akan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan pendanaan yang tersedia yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya

manusia dan sumber daya lain agar dapat mencapai tujuan organisasi dan selaras dengan visi dan misi Kabupaten Natuna.

Tabel II.5
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran

Indikator Sasaran : Indeks Kualitas Perencanaan		
Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.278.711.160
	1) Pelaksanaan Konsultasi Publik	129.497.600
	2) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	63.860.000
	3) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	401.736.480
	4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	683.617.080
	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	39.568.390
	1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	39.568.390
	3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	400.290.590
	1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	400.290.590
	2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		377.715.960
2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		32.457.810
3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		489.001.680
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		326.071.410
1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		164.823.230
2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		161.248.180
3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		318.752.310
1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	318.752.310	
	JUMLAH	3.262.569.310

Indikator Sasaran : Indeks Daya Saing Daerah		
Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	162.468.360
	1) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	162.468.360
	2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	162.697.920
	1) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	172.697.920
JUMLAH		335.166.280
TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG IKU		3.597.735.590

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran program yang mendukung Indikator Kinerja Utama sebesar Rp 3.597.735.590,- pada indikator Indeks Kualitas Perencanaan jumlah anggaran sebesar Rp 3.262.569.310,- yang terdiri dari dua program pendukung, yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dua program tersebut memberikan intervensi yang besar dalam tercapainya target kinerja. Sedangkan jumlah anggaran program pendukung indikator Indeks Daya Saing Daerah hanya sebesar Rp. 335.166.280,- yang hanya terdiri dari satu program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, khususnya pada pilar kapabilitas inovasi daerah yang mana pada pilar kapabilitas inovasi masih rendah kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal di Kabupaten Natuna, perlunya dorongan kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkat inovasi daerah serta perlunya mangalokasikan anggaran untuk melakukan riset dan penelitian. Program ini dinilai tidak banyak memberikan intervensi terhadap capaian Indeks Daya Saing Daerah karena hanya mendukung satu pilar yaitu Pilar Kapabilitas Inovasi dari dua belas pilar pembentuk Indeks Daya Saing Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemegang kepentingan dengan alokasi anggaran tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja (LKj) yang di susun secara periodik (satu tahun). Keberhasilan/kegagalan kinerja diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi SKPD.

Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memperhatikan karakteristik, komponen, realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penghitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata-rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan

dalam tujuh kategori penilaian sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Tabel III.1
Skala Penilaian

No.	Kategori	Nilai	Kategori Capaian
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup Baik
6	C	>30 – 50	Agak Kurang
7	D	0 – 30	Kurang

3.2. Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2023.

Pencapaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang diukur melalui 2 indikator sasaran yang capaiannya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7,5	7,6	101,33
2	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8255	2,63	93,08
Nilai rata-rata capaian kinerja					97,21

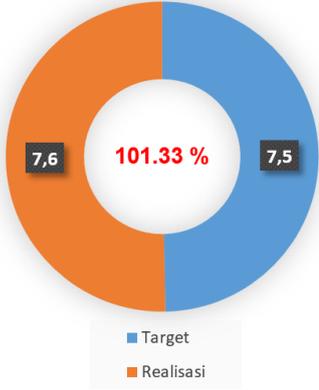
Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2023 terealisasi mencapai 97,21 %, dengan penjelasan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

SASARAN 1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

INDEK KUALITAS PERENCANAAN

Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) merupakan pengukuran perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) di daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada tahun 2023 Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kabupaten Natuna mempunyai target dengan nilai 7,5, adapun realisasi dengan nilai 7,6 sehingga dengan hasil tersebut maka capaian IKP Kabupaten Natuna Tahun 2023 sebesar 101,33 %.



Metode Pengukuran

Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kabupaten Natuna Tahun 2023 menggunakan 2 aspek. Kedua aspek memiliki koherensi dengan kualitas perencanaan pembangunan. Aspek yang dimaksud adalah aspek kesesuaian antara isu strategis - target - program/kegiatan di RPJMD atau RKPD, dan aspek riset dan inovasi perencanaan pembangunan. Aspek dan indikator pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan dengan bagan kerangka berpikir sebagaimana Gambar 3.1 berikut ini:

Gambar III.1
Aspek dan Indikator Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Natuna tahun 2023



Setiap aspek Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) ditetapkan bobotnya. Penetapan bobot dimaksudkan untuk memberikan gambaran perbedaan tingkat kedalaman pengaruh setiap aspek terhadap nilai total IKP. Bobot setiap aspek, indikator, dan sub-aspek.

Hasil Pengukuran

Skor Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kabupaten Natuna Tahun 2023 sebesar 76 (skala 0-100) atau sebesar 7,6 (skala 0-10). Rincian nilai setiap aspek, indikator, dan sub-indikator dapat dilihat pada Lampiran III. Aspek kesesuaian antara isu strategis - target - program/kegiatan di RPJMD atau RKPD mendapatkan skor 68 dari nilai maksimal 74 yang dapat dicapai. Capaian Aspek ini sebesar 91,89%, yang menunjukkan bahwa secara umum permasalahan pembangunan, isu strategis, prioritas pembangunan, dan prioritas program telah sesuai. Aspek riset dan inovasi perencanaan mendapatkan skor 8 dari nilai maksimal 26 yang dapat dicapai. Capaian aspek ini sebesar 30,77%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi riset dan inovasi dalam perencanaan masih rendah. Hasil hasil riset sejauh ini belum dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Inovasi yang berkaitan dengan perencanaan belum optimal baik secara jumlah maupun ketepatan dalam menjawab kebutuhan perencanaan. Target IKP Tahun 2023 yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah sebesar 7,5. Nilai IKP Tahun 2023 sebesar 7,6 sehingga capaian Nilai IKP terhadap Target IKP Tahun 2023 adalah sebesar 101,33%.

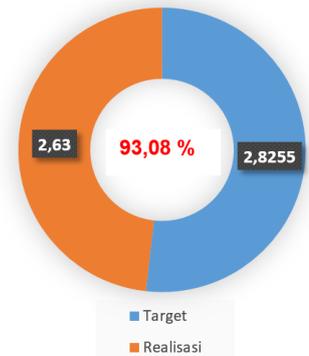
SASARAN 2

Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan

INDEK DAYA SAING DAERAH

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Berdasarkan Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, menunjukkan bahwa Kabupaten Natuna memperoleh Skori 2,63, sedangkan target IDSD Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 2,8255, maka capaian IDSD Kabupaten Natuna tahun 2022 sebesar 93,08%.

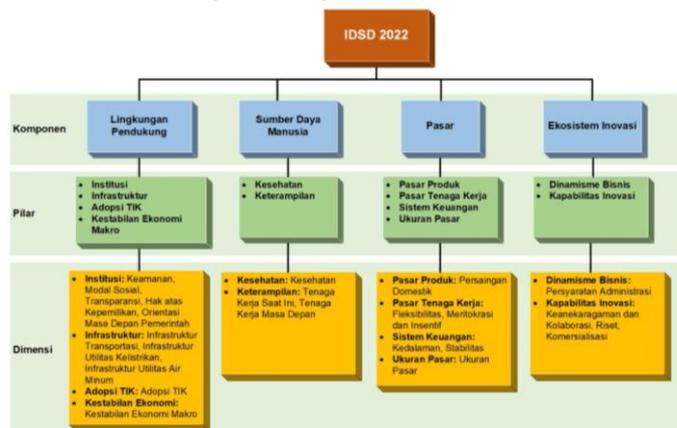


Kerangka pengukuran IDSD 2023 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2023 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Jumlah indikator yang digunakan sebanyak 48 indikator untuk kabupaten/kota.

Kerangka Pengukuran

Kerangka pengukuran IDSD 2023 mengacu kepada *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing seperti pada gambar III.1 berikut:

Tabel III.3
Kerangka Pengukuran IDSD 2023



Sumber: diadopsi dari Global Competitiveness Index (WEF, 2019)
Keterangan: Komponen dan dimensi tidak masuk dalam penghitungan indeks dan hanya merupakan pengelompokan yang digunakan untuk tujuan analisis.

Komponen IDSD 2023



Lingkungan Pendukung

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu **Institusi** yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan; **Infrastruktur** yang dapat mendukung aktivitas perekonomian; **Adopsi TIK** yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan industri 4.0; dan **Stabilitas Ekonomi Makro** yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup.



Sumber Daya Manusia

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu **Kesehatan** yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup; dan **Keterampilan** yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.



Pasar

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu **Pasar Produk** yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; **Pasar Tenaga Kerja** yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; **Sistem Keuangan** yang merefleksikan kemampuan system finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan **Ukuran Pasar** yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya Iptek.



Ekosistem Inovasi

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu **Dinamisme Bisnis** yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja; dan **Kapabilitas Inovasi** yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Metodologi

Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2023 distandardisasi dengan metode min-max. Adapun setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama terhadap indeks sehingga diberikan bobot yang sama. Untuk menghitung indeks, dilakukan agregasi skor pilar daya saing menggunakan metode rata-rata aritmatik.

Gambar III.2
Metodologi Perhitungan IDSD 2023



Berdasarkan metodologi perhitungan yang dilakukan oleh BRIN, Rincian Skor IDSD Kabupaten Natuna Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Skor IDSD Kabupaten Natuna 2023

Nasional / Provinsi/ Kabupaten	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekosisten Inovasi		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
Kep. Riau	4,41	2,99	4,79	2,78	3,75	3,91	0,97	4,46	1,38	3,02	5,00	2,91	3,36
Natuna	4,24	3,65	2,93	2,40	3,46	3,32	0,70	2,37	1,83	0,96	5,00	0,68	2,63

Keterangan:

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Pilar 1 : Institusi | Pilar 5 : Kesehatan | Pilar 9 : Sistem Keuangan |
| Pilar 2 : Infrastruktur | Pilar 6 : Keterampilan | Pilar 10 : Ukuran Pasar |
| Pilar 3 : Adopsi TIK | Pilar 7 : Pasar Produk | Pilar 11 : Dinamisme Bisnis |
| Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro | Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja | Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara total skor IDSD Kabupaten Natuna tahun 2023 adalah 2,63, berada dibawah skor IDSD Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, akan tetapi terdapat dua pilar yang melebihi skor Provinsi yaitu pilar Infrastruktur dan Pilar Sistem Keuangan, dan ada dua pilar yang memiliki skor lebih tinggi dari nasional, yaitu pilar Institusi dan Pilar Infrastruktur. Selanjutnya ada tiga pilar yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Natuna dalam upaya meningkat nilai IDSD tahun berikutnya, yaitu pada pilar Pasar Produk, Pilar Ukuran Pasar dan Pilar Kapabilitas Inovasi.

Berikut penjelasan masing-masing pilar serta dimensi, indikator dan sumber datanya:

PILAR 1: INSTITUSI

Skor Pilar Institusi Kabupaten Natuna adalah 4,24, lebih tinggi dari skor nasional yang hanya 4,14. Ini menandakan bahwa Kabupaten Natuna memiliki institusi yang kuat, Institusi yang kuat merupakan pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Institusi memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang memengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal. Pelaku ekonomi akan berinvestasi di suatu daerah yang memiliki institusi yang membentuk iklim bisnis yang kondusif.

Tabel III.5
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Institusi

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Keamanan	Kejadian Pungutan Liar Tingkat Pembunuhan	Kemenko Polhukam Mabes Polri & BPS
Check & Balances	Transparansi Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kinerja Instansi Pemerintah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPK Kemenpan RB Kemenpan RB Kemenpan RB
Transparansi Hak Atas Kepemilikan	Upaya Pencegahan Korupsi Hak atas kepemilikan Kualitas administrasi pertanahan	KPK Mabes Polri & BPS Kemen ATR/ BPS
Orientasi masa depan pemerintah	Tingkat pengelolaan lingkungan	KLHK

PILAR 2: INFRASTRUKTUR

Skor Pilar Infrastruktur Kabupaten Natuna adalah 3,65 lebih tinggi dari skor provinsi dan Nasional yang hanya 2,99 dan 2,91. Tingginya skor pilar infrastruktur merupakan hasil dari komitmen pemerintah Kabupaten Natuna dalam peningkatan dan pemerataan pembangunan. Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur menyediakan layanan dasar dan mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya bersaing. Infrastruktur yang memadai akan mendukung aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien.

Tabel III.6
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Infrastruktur

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Infrastruktur Transportasi	Konektivitas jalan Kualitas infrastruktur jalan Proporsi jumlah stasiun kereta api Proporsi jumlah bandara Proporsi jumlah pelabuhan	Kemen PUPR Kemen PUPR Kemen Perhubungan Kemen Perhubungan Kemen Perhubungan
Infrastruktur utilitas Kelistrikan	Rasio elektrifikasi	Kemen ESDM
Infrastruktur Utilitas air minum	Air minum layak	Kemen PUPR

PILAR 3: ADOPSI TIK

Skor pilar adopsi TIK Kabupaten Natuna adalah 2,93 dibawah skor Provinsi dan Nasional. Hingga saat ini masih banyaknya daerah di Kabupaten Natuna yang belum terjangkau jaringan komunikasi yang memadai sehingga belum mampu

memaksimalkan penggunaan TIK. Daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih produktif. Pada tahun 2021, melalui program Bakti Kominfo, telah mulai di bangun beberapa BTS di daerah yang terisolir dari jaringan komunikasi, semoga adopsi TIK dapat merata diseluruh daerah Kabupaten Natuna.

Tabel III.7
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Adopsi TIK

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Adopsi TIK	Pengguna telepon seluler	BPS
Transportasi	Jangkauan jaringan 4G	Kemen Kominfo
	Pelanggan internet fixed-broadband	Kemen Kominfo & BPS
	Pengguna internet	BPS

PILAR 4: STABILITAS EKONOMI MAKRO

Pilar stabilitas ekonomi makro memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah yang dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro yang stabil merupakan kunci kepercayaan investor dan memudahkan pelaku ekonomi dalam menjalankan usaha, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Ekonomi makro yang stabil dapat meningkatkan kepercayaan investor baik lokal maupun mancanegara untuk berinvestasi di suatu daerah. Skor Pilar stabilitas ekonomi makro Kabupaten Natuna tahun 2023 adalah 2,40, dibawah skor Provinsi dan Nasional.

Tabel III.8
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Stabilitas Ekonomi Makro

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Kestabilan Ekonomi Makro	Kapasitas fiskal daerah	Kemen Keuangan
	Pertumbuhan ekonomi	BPS
	Tingkat pengangguran terbuka	Kemen PPN/Bappenas
	Indeks ketahanan pangan	Kemen Pertanian
	Nilai investasi	BPS
	PDRB per kapita	BPS

PILAR 5: KESEHATAN

Skor pilar kesehatan pada tahun 2023 adalah 3,46. Skor ini cukup tinggi mendekati skor Provinsi dan Nasional yaitu 3,75 dan 3,76. Pilar kesehatan menggambarkan tahun hidup masyarakat melalui Angka Harapan Hidup. Berdasarkan data BPS, angka harapan hidup kabupaten natuna tahun 2023 cukup tinggi yaitu 65,76. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penduduk yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif dan kreatif.

Tabel III.9
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Angka Harapan Hidup

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Kesehatan	Angka Harapan Hidup	BPS

PILAR 6: KETERAMPILAN

Skor Pilar Keterampilan tahun 2023 adalah 3,32, skor ini cukup tinggi akan tetapi masih dibawa skor Provinsi dan Nasional yaitu 3,91 dan 3,73. Pilar keterampilan mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di suatu wilayah. Keterampilan tenaga kerja merupakan salah satu keunggulan kompetitif bagi sektor bisnis karena menjadi penyeimbang antara integrasi teknologi dan investasi modal manusia (Lawler, et.al. 2003). Keterampilan tenaga kerja merupakan salah satu keunggulan kompetitif bagi sektor bisnis.

Tabel III.10
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Keterampilan

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Tenaga kerja saat ini	Rata-rata lama sekolah	BPS
	Keterampilan lulusan	BPS
Tenaga kerja masa depan	Kemudahan menemukan pekerja terampil	BPS
	Angka harapan sekolah	BPS
	Berfikir kritis dalam mengajar	Kemendikbudristek
	Rasio murid-guru pendidikan dasar	Kemendikbudristek

PILAR 7: PASAR PRODUK

Skor pilar pasar produk tahun 2023 sebesar 0,70, dibawah skor Provinsi dan Nasional yaitu 0,97 dan 2,68. Skor ini tergolong rendah dan harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Natuna agar skor pilar pasar produk meningkat dimasa mendatang. Rendahnya nilai pasar produk dikarenakan masih kurangnya kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing diantara kelompok usaha sedang dan besar, tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok bermodal besar adalah kelompok yang dapat mendominasi pasar. Perlunya bantuan modal bagi UMKM agar bisa bersaing dengan kelompok usaha sedang dan besar

Tabel III.11
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Pasar Produk

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Persaingan Domestik	Persaingan sector jasa	BPS

PILAR 8: PASAR TENAGA KERJA

Skor pilar pasar tenaga kerja tahun 2023 adalah 2,37, dibawah skor provinsi dan Nasional yaitu 4,46 dan 3,73. Fleksibilitas tenaga kerja dan besarnya upah merupakan faktor penentu pasar tenaga kerja. Investor akan mempertimbangkan

tingkat keterampilan dan upah tenaga kerja yang akan dibayar, dalam menanamkan modal bisnisnya. Tenaga kerja mempertimbangkan upah yang akan diterima dan kesejahteraan sosial lainnya dalam memutuskan untuk bekerja. Pasar tenaga kerja yang efisien, dimana kepentingan investor dan tenaga kerja terfasilitasi akan mendorong produktivitas.

Tabel III.12
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Pasar Tenaga Kerja

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Fleksibilitas	Kebijakan pasar tenaga kerja	BPS
	Upah pekerja	BPS
Meritokrasi dan insentif	Kesetaraan upah perempuan dan laki-laki	BPS

PILAR 9: SISTEM KEUANGAN

Sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta membantu lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran. Sistem keuangan yang kuat tidak hanya memediasi alokasi sumber daya keuangan yang efisien tapi juga memitigasi potensi krisis keuangan. Skor pilar sistem keuangan Kabupaten Natuna tahun 2023 adalah 1,83.

Tabel III.13
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Sistem Keuangan

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Kedalaman	Kredit Usaha Rakyat (KUR) per Penduduk	Kemen Keuangan & BPS

PILAR 10: UKURAN PASAR

Skor pilar pasar tahun 2023 sebesar 0,96, skor ini sangat rendah dan di bawah skor Provinsi dan Nasional yaitu 3,02 dan 1,31. Pilar ukuran pasar memengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan perusahaan mengeksploitasi skala ekonomi. Ukuran pasar menguatkan struktur industry sehingga meningkatkan nilai tambah salah satu dimensi dari pilar ukuran pasar adalah PDRB.

Tabel III.14
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Ukuran Pasar

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Ukuran Pasar	PDRB	BPS

PILAR 11: DINAMISME BISNIS

Skor pilar dinamisme bisnis tahun 2023 adalah 5,00, skor ini cukup tinggi, sama dengan skor Provinsi dan Nasional. Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan

melakukan bisnis yang dilihat melalui administrasi dan budaya kewirausahaan. Secara administratif, rendahnya hambatan untuk memulai bisnis serta kejelasan hukum mengenai kepailitan akan memudahkan perusahaan keluar masuk pasar. Sektor swasta yang gesit dan dinamis dapat meningkatkan produktivitas dengan mengambil risiko bisnis, menguji ide-ide baru, dan menciptakan produk serta layanan yang inovatif.

Tabel III.15
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Ukuran Pasar

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Persyaratan administrasi	Biaya untuk memulai usaha	Kemenkum HAM & BKPM
	Waktu untuk memulai usaha	Kemenkum HAM & BKPM

PILAR 12: KAPABILITAS INOVASI

Pada tahun 2022 Skor pilar kapabilitas inovasi Kabupaten Natuna hanya 0,68, sangat rendah jika dibandingkan dengan skor Provinsi dan Nasional yaitu 2,91 dan 2,62. Hal ini menerangkan bahwa masih rendahnya kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal di Kabupaten Natuna, perlunya dorongan kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan penyediaan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada penyelesaian isu strategis daerah.

Tabel III.16
Dimensi, Indikator dan Sumber Data Pilar Kapabilitas Inovasi

Dimensi	Indikator	Sumber Data
Keanekaragaman dan kolaborasi Riset	Keanekaragaman tenaga kerja	BPS
	Pubikasi ilmiah Aplikasi kekayaan intelektual (KI)	Kemendikbudristek Kemendikbudristek, KemenkumHAM & Kementan
	Belanja riset	Kemendagri & Kemendikbudristek
Komersialisasi	Indeks keunggulan lembaga riset	Kemendikbudristek
	Aplikasi merk dagang	Kemendikbudristek & KemenkumHAM

Upaya meningkatkan daya saing daerah memerlukan peran penting pemerintah dalam mengarahkan dan mensinergikan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki *stakeholders* terkait dengan dukungan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Perencanaan dan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Natuna, beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator kinerja diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pada pilar kapabilitas inovasi masih rendahnya kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal di Kabupaten Natuna, perlunya dorongan kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkat inovasi daerah serta perlunya mengalokasikan anggaran untuk melakukan riset dan penelitian
2. Kontribusi riset dan inovasi dalam perencanaan masih rendah. Hasil- hasil riset sejauh ini belum dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Inovasi yang berkaitan dengan perencanaan belum optimal baik secara jumlah maupun ketepatan dalam menjawab kebutuhan perencanaan

Berdasarkan permasalahan tersebut, upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan guna percepatan meningkatkan Indeks Kualitas Perencanaan dan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Natuna diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran selaras dengan RPJMD dan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepulauan Riau
2. Meningkatkan kapasitas inovasi dengan melakukan pengembangan inovasi melalui riset, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi.
3. Mendorong kapasitas inovasi dengan mengalokasikan anggaran riset, penguatan SDM Iptek, meningkatkan Hak Paten dan Merk, membuka investasi pihak ke-3.

Secara umum keberhasilan pencapaian keseluruhan indikator kinerja sasaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna antara lain didukung oleh:

1. Pelaksanaan perencanaan yang telah menggunakan sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna (*e-Planning*) yang telah terintegrasi dari RPJMD, Renstra, Renja yang disinkronkan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dimana antara Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Kecamatan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Semua proses perencanaan telah menggunakan sistem aplikasi Infis Perencanaan (*e-planning*).
2. Dalam pencapaian indikator kinerja, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan evaluasi pencapaian program dan

- kegiatan setiap Triwulan yaitu Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV dengan menggunakan aplikasi ekejap.
3. Melaksanakan monitoring dan reviu secara berkala terhadap Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.
 4. Melaksanakan reviu secara berkala terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Natuna.
 5. Melaksanakan monitoring pencapaian target jangka menengah semua program dan kegiatan dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.
 6. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi laporan kinerja BP3D dan hasil evaluasi lainnya seperti hasil evaluasi rancangan akhir RKPD dan hasil evaluasi lainnya dari Inspektorat Kabupaten Natuna maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran dari tahun 2021 – 2023 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel III.17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 – 2023
Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

No.	Nasional/Prov/ Kab	Indeks Kualitas Perencanaan			Indeks Daya Saing Daerah		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nasional	n.a	n.a	n.a	n.a	3,26	3,26
2	Provinsi Kep. Riau	n.a	n.a	n.a	2.981	3,36	3,36
3	Kabupaten Natuna	6,3	7,4	7.6	2,726	2,63	2,63

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kualitas Perencanaan tahun 2023 terealisasi sebesar 7,4 meningkat dari realisasi tahun sebelumnya yaitu 7,4. Untuk Indeks Kualitas Perencanaan Provinsi dan Nasional datanya tidak tersedia. Sedangkan pada Indeks Daya Saing Daerah terealisasi sebesar 2,63 sama dengan tahun sebelumnya yaitu 2,63 dan terjadi penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 2,726. Hal ini dikarenakan metode pengukuran IDSD 2022 dan 2023 berbeda dengan IDSD 2021, pada tahun 2021 pengukuran IDSD dilakukan dengan metode penginputan yang dilakukan pemerintah daerah sebanyak 97 indikator pada aplikasi Badan Riset Nasional. Sedangkan pada tahun 2022 metode pengukuran dilakukan dengan mengolah data sekunder dari K/L penyedia data, untuk kabupaten/kota sebanyak 48 indikator. Jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi dan Nasional, capaian Kabupaten Natuna masih

dibawah Provinsi pada tahun 2021 yaitu 2,981, untuk data Nasional tahun 2021 tidak tersedia. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 masih dibawah Provinsi yaitu dan 3,36 dan Nasional 3,26.

Realisasi kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra untuk melihat dan mengukur capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026. Capaian indikator kinerja terhadap target akhir Renstra untuk masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel III.18 berikut:

Tabel III.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2023			Target akhir Renstra	Capaian terhadap Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah							
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7,5	7,6	101,33	8,1	93,83
Sasaran: Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan							
2	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8255	2,63	93,08	3,1255	84,15

3.3 Analisis Keuangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 209), alokasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 sebesar Rp 9.633.627.926,- (Sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dilakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 244), anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengalami perubahan kenaikan sebesar Rp 2.136.842.543,- (Dua milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi Rp 11.770.470.469,- (Sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Tabel III.19
Laporan Realisasi Anggaran
Program/Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis, Indikator dan Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator (%)
		Anggaran	Realisasi	%	
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah					
Indeks Kualitas Perencanaan		3.262.569.310	2.240.900.087	68,68	101,33
I	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.718.570.140	1.222.806.020	71,15	
	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.278.711.160	988.530.882	77,31	
	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	39.568.390	0	0,00	
	3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	400.290.590	234.275.138	58,53	
II	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.543.999.170	1.018.094.067	65,95	
	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	899.175.450	646.999.073	71,95	
	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	326.071.410	113.322.207	34,75	
	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	318.752.310	257.772.787	80,87	
Sasaran: Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan					
Indeks Daya Saing Daerah		335.166.280	214.343.797	63,95	93,08
I	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	335.166.280	214.343.797	63,95	
	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	162.468.360	105.515.879	64,95	
	2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	172.697.920	108.826.918	63,02	
TOTAL		3.597.735.590	2.455.243.884	68,24	97,21

Akuntabilitas kinerja juga dibandingkan dengan akuntabilitas keuangan. Secara umum akuntabilitas keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dapat dijelaskan dari jumlah belanja langsung sebesar Rp. 11.770.470.469,- dialokasikan sebesar Rp. 3.597.735.590,- untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU), dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.455.243.884,- atau 68,24%, sedangkan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar 97,21%. Efisiensi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 sebesar 30,57%. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan belanja langsung, sehingga didapatkan hasil inefisiensi anggaran sebesar 69,43%. Jika dibandingkan dengan inefisiensi tahun 2022 yaitu sebesar 69,65 sehingga dapat disimpulkan terjadi penurunan inefisiensi sebesar -0,22%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan ke dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Telah ditetapkan rencana kinerja yang menjadi komitmen Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan pembangunan tahun 2023. Dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Natuna.

Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang tersedia melalui APBD Kabupaten Natuna Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.770.470.469,- (Sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Sasaran ***Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan*** sebesar Rp. 3.597.735.590,- (Tiga milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Sasaran strategis Meningkatkan Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatkan Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan yang tercakup dalam 3 program dan 8 kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2023 dapat dicapai sepenuhnya dengan capaian 97,21% dengan kategori “**AA atau SANGAT MEMUASKAN**”. Hal ini menunjukkan adanya komitmen penuh dari Pimpinan (kepala) beserta dukungan pegawai/staf dilingkungan Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023. Faktor pendukung capaian indikator sasaran diantaranya keberhasilan kegiatan Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*) dengan aplikasi Infis Perencanaan Kabupaten Natuna (*e-planning*) yang telah terintegrasi dari RPJMD, Renstra, Renja yang disinkronkan dengan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dimana antara Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Kecamatan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Selain itu, hal yang tak kalah penting dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini adalah adanya koordinasi yang baik dalam internal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap capaian indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui evaluasi hasil RKPD yang dilaksanakan setiap triwulan, dan peran pimpinan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mendampingi dan menekankan kepada bidang-bidang yang membawahi SKPD sesuai bidangnya dalam mengawal dan mengevaluasi pencapaian indikator kerjanya sehingga dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel IV.1
Capaian Kinerja Tahunan
Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 2021-2026
Tahun Anggaran 2023-2023

MISI 6 : “Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (<i>smart bureaucracy</i>)”					
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	
				2022	2023
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	113,85	101,33
		Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	93,41	93,08
Nilai rata-rata capaian kinerja				103,63	97,21

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja tahun 2023 terjadi penurunan dari tahun 2022, hal ini dikarenakan realisasi indeks daya saing daerah tahun 2023 belum dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional sehingga masih menggunakan realisasi tahun 2022, selain itu target Indeks Kualitas Perencanaan tahun 2023 sangat tinggi yaitu 7,5 dibandingkan dengan target tahun 2022 hanya 6,5. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja Tahun 2023 diantaranya agar dapat melakukan pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan

program/kegiatan agar realisasi capaian kinerja dan anggaran dapat tercapai sesuai target, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah terkait dengan pencapaian indikator yang memerlukan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta meningkatkan kapasitas inovasi dengan melakukan pengembangan inovasi melalui riset, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi serta meningkatkan kreatifitas yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dimasa datang.

Ranai, 15 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MOESTOFA ALBAKRY, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 04 Januari 2023

Pihak Kedua,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7.5
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8255

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	6.514.598.716,00
2. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	232.257.920,00
3. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.556.700.720,00
4. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.330.070.570,00
Jumlah	Rp.	9.633.627.926,00

Ranai, 04 Januari 2023

Bupati Natuna,

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah


WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MOESTOFA ALBAKRY, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 9.633.627.926,00 (Sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam) menjadi Rp. 11.770.470.469,00 (Sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Ranal, 26 Oktober 2023
Pihak Pertama,

MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7.5
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8255

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	8.172.734.879,00
2. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	335.166.280,00
3. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.718.570.140,00
4. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.543.999.170,00
Jumlah	Rp.	11.770.470.469,00

Ranai, 26 Oktober 2023

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bupati Natuna,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7,5	7,6	101,33
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8255	2,63	93,08
Rata-rata						97,21

Jumlah Anggaran :

	Target	Realisasi	%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 8.172.734.879,00	Rp. 7.790.037.243,00	95,32
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 335.166.280,00	Rp. 214.342.797,00	63,95
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.718.570.140,00	Rp. 1.222.806.020,00	71,15
4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.543.999.170,00	Rp. 1.018.094.067,00	65,94
Jumlah	Rp. 11.770.470.469,00	Rp. 10.245.280.127,00	87,04

Ranai, 9 Januari 2024



TABEL PENILAIAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2023

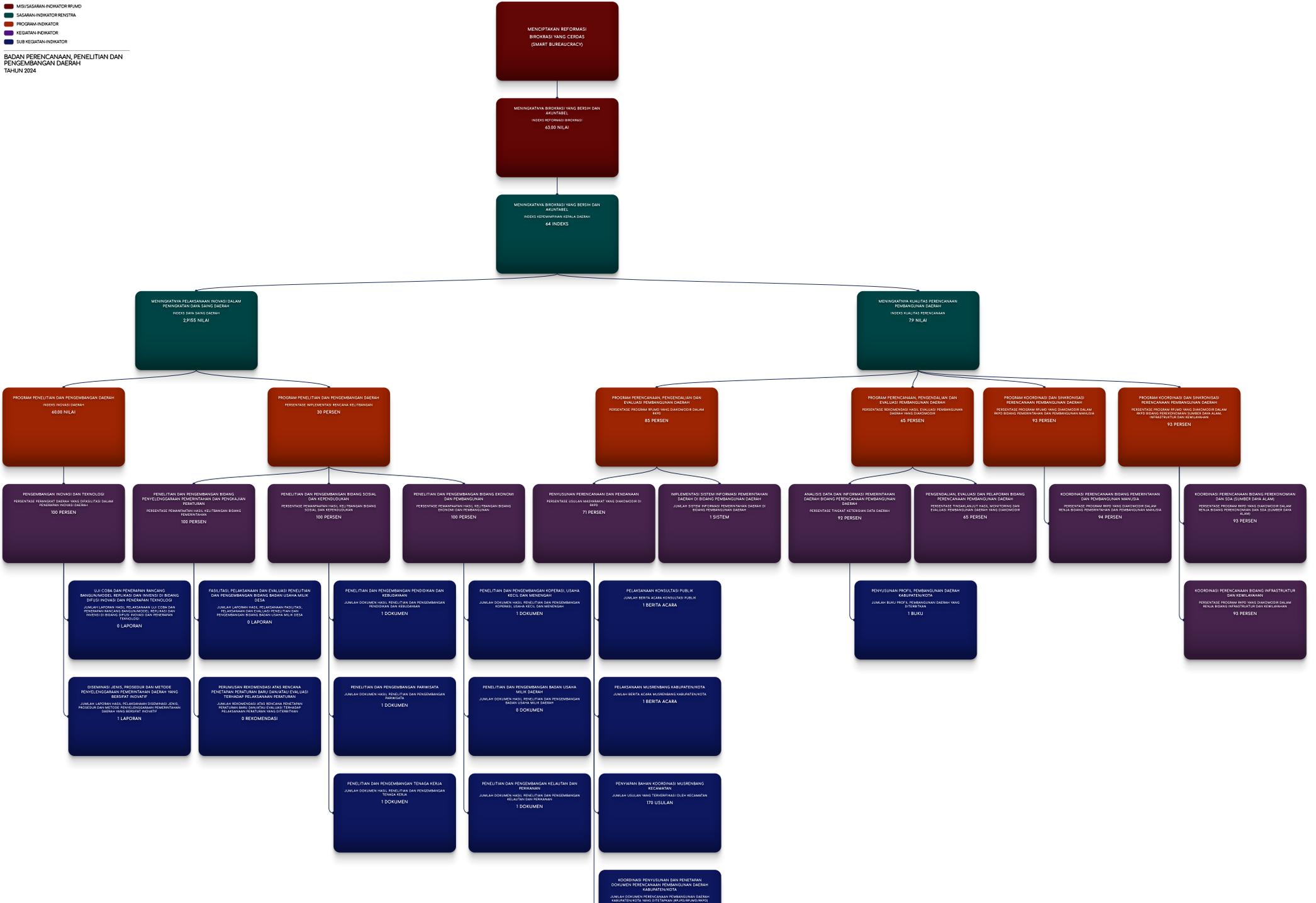
Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub-Indikator		Opsi	Penilaian	Bobot	Definisi	Kelengkapan Dokumen	Skor (Penilaian Assessor)	Pernyataan Assessor	Argumen Assessor	Lampiran Bukti (Tangkapan Layar Dokumen)										
INDEKS KUALITAS PERENCANAAN				100	mempertimbangkan Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD, dan Tingkat Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan pemda.		73													
a.	Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan di RPJMD atau RKPD			74	Mengukur Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD.	Mencantumkan dokumen RPJMD dan RKPD.	68													
1)	Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah			24	Mengukur Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah.		18													
	a)	Keterkaitan permasalahan daerah (kebutuhan daerah) dengan hasil evaluasi	<table border="1"> <tr> <td>A. Penyusunan kebutuhan daerah sama dengan atau kurang dari 25% hasil evaluasi</td> <td>A = 1</td> </tr> <tr> <td>B. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% hasil evaluasi</td> <td>B = 2</td> </tr> <tr> <td>C. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% hasil evaluasi</td> <td>C = 4</td> </tr> <tr> <td>D. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% hasil evaluasi</td> <td>D = 6</td> </tr> <tr> <td>E. Penyusunan kebutuhan daerah 100% berdasarkan hasil evaluasi</td> <td>E = 8</td> </tr> </table>	A. Penyusunan kebutuhan daerah sama dengan atau kurang dari 25% hasil evaluasi	A = 1	B. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% hasil evaluasi	B = 2	C. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% hasil evaluasi	C = 4	D. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% hasil evaluasi	D = 6	E. Penyusunan kebutuhan daerah 100% berdasarkan hasil evaluasi	E = 8	8	Mengukur keterkaitan permasalahan daerah (kebutuhan daerah) dengan hasil evaluasi	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	6	Terdapat 1 permasalahan pembangunan Kabupaten Natuna yang tidak didukung oleh bukti hasil evaluasi, yaitu "Belum terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"	Dari 5 permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Natuna didapatkan 4 permasalahan yang koheren dengan hasil evaluasi RKPd Tahun 2021. Tidak ditemukan tabel hasil evaluasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada RKPd 2023. Assessor memberikan skor 8 dengan asumsi bahwa penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% hasil evaluasi	Lampiran 1
A. Penyusunan kebutuhan daerah sama dengan atau kurang dari 25% hasil evaluasi	A = 1																			
B. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% hasil evaluasi	B = 2																			
C. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% hasil evaluasi	C = 4																			
D. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% hasil evaluasi	D = 6																			
E. Penyusunan kebutuhan daerah 100% berdasarkan hasil evaluasi	E = 8																			
	b)	Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan	<table border="1"> <tr> <td>A. Kesesuaian sama dengan atau kurang dari 25%</td> <td>A = 1</td> </tr> <tr> <td>B. Kesesuaian lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50%</td> <td>B = 2</td> </tr> <tr> <td>C. Kesesuaian lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75%</td> <td>C = 4</td> </tr> <tr> <td>D. Kesesuaian lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99%</td> <td>D = 6</td> </tr> <tr> <td>E. Kesesuaian 100%</td> <td>E = 8</td> </tr> </table>	A. Kesesuaian sama dengan atau kurang dari 25%	A = 1	B. Kesesuaian lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50%	B = 2	C. Kesesuaian lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75%	C = 4	D. Kesesuaian lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99%	D = 6	E. Kesesuaian 100%	E = 8	8	Mengukur keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	8	Prioritas pembangunan yang ditetapkan telah mengacu atau telah didasari oleh permasalahan pembangunan	Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 yang disebutkan dalam RKPd tahun 2023 hal IV-13 s.d IV-14 telah mengacu atau berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang diuraikan pada Dokumen RKPd Tahun 2023 hal II-148 s.d. II-157	Lampiran 2
A. Kesesuaian sama dengan atau kurang dari 25%	A = 1																			
B. Kesesuaian lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50%	B = 2																			
C. Kesesuaian lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75%	C = 4																			
D. Kesesuaian lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99%	D = 6																			
E. Kesesuaian 100%	E = 8																			

	c)	Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis	A. Penyusunan prioritas sama dengan atau kurang dari 25% isu strategis yang telah diidentifikasi B. Penyusunan prioritas lebih dari 25% dan sama dengan atau lebih besar 50% isu strategis yang telah diidentifikasi C. Penyusunan prioritas lebih dari 50% dan sama dengan atau lebih besar 75% isu strategis yang telah diidentifikasi D. Penyusunan prioritas lebih dari 75% dan sama dengan atau lebih besar 99% isu strategis yang telah diidentifikasi E. Penyusunan prioritas 100% berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi	A = 1 B = 2 C = 4 D = 6 E = 8	8	Mengukur keterkaitan penyusunan prioritas pembangunan daerah dengan isu strategis.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	4	Prioritas pembangunan telah mengacu pada isu-isu strategis, namun tidak semua isu strategis diakomodir menjadi prioritas pembangunan	8 prioritas pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2023 telah mengacu dan terkait dengan isu strategis daerah maupun nasional. Namun demikian masih adanya isu strategis nasional yang belum secara spesifik dirumuskan menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2023. Isu-isu strategis nasional yang dimaksud adalah penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri serta penguatan riset terapan.	Lampiran 3
	2)	Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah			18	Mengukur kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	18			
	a)	Tersedianya indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B = 6	6	Pemerintah daerah memiliki indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	6	Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah	Tabel T.IV-1 pada Dokumen RKPD Tahun 2023 halaman IV-26 sampai dengan IV-118 telah cukup untuk menunjukkan dan menjelaskan adanya indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah	Lampiran 4
	b)	Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah	A. =< 25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. => 75%	A = 2 B = 5 C = 8 D = 12	12	Mengukur Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	12	Indikator sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Natuna telah sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan isu strategis	Tabel T.IV-1 pada Dokumen RKPD Tahun 2023 halaman IV-26 sampai dengan IV-118 telah cukup untuk menunjukkan dan menjelaskan kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis	Lampiran 5
	3)	Kesesuaian Program/Kegiatan dalam mencapai target dan sasaran program			32	Mengukur kesesuaian program/kegiatan/proyek dalam mencapai target dan sasaran program.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	32			
	a)	Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan menjadi program prioritas	A. =< 25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. => 75%	A = 4 B = 8 C = 12 D = 16	16	Mengukur proporsi prioritas pembangunan daerah dijabarkan menjadi program prioritas.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	16	Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 telah dijabarkan menjadi program prioritas	Prioritas pembangunan daerah yang berdasarkan isu strategis Kabupaten Natuna Tahun 2023 yang diuraikan menjadi 8 poin prioritas, seluruhnya telah dijabarkan menjadi program prioritas	Lampiran 6
	b)	Tingkat Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas	A. =< 25% B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. => 75%	A = 4 B = 8 C = 12 D = 16	16	Mengukur Tingkat Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	16	Indikator kinerja program prioritas terkait lebih dari 75% terhadap indikator prioritas pembangunan	Tabel T.IV-1 pada Dokumen RKPD Tahun 2023 halaman IV-26 sampai dengan IV-118 telah cukup untuk menunjukkan dan menjelaskan keterkaitan indikator kinerja program prioritas terhadap indikator prioritas pembangunan	Lampiran 7

b.	Riset dan Inovasi Perencanaan Pembangunan			26	Mengukur tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemda dalam proses Perencanaan pembangunan.	Mencantumkan Dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD)	8			
1)	Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	A. 0 B. 1-3 C. 4-6 D. 7 atau lebih	A = 0 B = 2 C = 4 D = 6	6	Mengukur jumlah hasil riset yang dimanfaatkan pada perencanaan pembangunan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	0	Tidak ada hasil riset yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Hasil riset-riset dapat memperkuat argumen dari sudut pandang akademis dalam perencanaan pembangunan. Dalam Dokumen RKPD tahun 2023 tidak ditemukan adanya daftar hasil riset yang dimanfaatkan atau menjadi landasan akademis dalam penyusunan perencanaan pembangunan.	--
2)	Keterkaitan permasalahan dengan Inovasi yang dilaksanakan	A. Lemah B. Kuat	A = 2 B = 4	4	Mengukur Keterkaitan permasalahan dengan Inovasi yang dilaksanakan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	2	Inovasi perencanaan yang dilakukan berkaitan lemah dengan permasalahan pembangunan daerah, atau berkaitan tapi tidak secara langsung	Inovasi SIPENTING dan SIKEJAP tidak secara langsung menjawab permasalahan pembangunan daerah. Tingkat keterkaitannya dapat diasumsikan lemah.	Lampiran 8
3)	Keterkaitan output dengan outcome inovasi	A. Lemah B. Kuat	A = 2 B = 4	4	Mengukur Keterkaitan Output dengan outcome Inovasi.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	2	Keterkaitan output dengan outcome inovasi yang telah dilakukan lemah	Tidak ditemukan outcome pada dokumen inovasi SIPENTING maupun SEKEJAP/EKEJAP	Lampiran 9
4)	Jumlah proyek inovasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	A. 0 B. 1-5 C. 6-10 D. 10 atau lebih	A = 0 B = 4 C = 8 D = 12	12	Mengukur jumlah inovasi perencanaan pembangunan.	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan .	4	Jumlah inovasi yang dilakukan sebanyak 2 inovasi	Inovasi yang "diakui" sebagai inovasi perencanaan adalah inovasi yang telah melalui proses dan mekanisme inovas daerah sesuai dengan PP No 38 Tahun 2017 serta berkaitan dengan perencanaan pembangunan	Lampiran 10
				100.00	Skor Total		76.00			

- MISI/SASARAN-INDIKATOR RUMUD
- SASARAN-INDIKATOR
- PROGRAM-INDIKATOR
- KEGIATAN-INDIKATOR
- SUB-KEGIATAN-INDIKATOR

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2024





EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan				
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12		15=14/5x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		4A																								16	
5.01.		PERENCANAAN																											
5.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88.35	178,132,000	0	88.35	40,000,000	88.35	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	178,132,000	0	70	40,000,000	70	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	104,066,000	0	2	20,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	74,066,000	0	3	20,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,067,806,973	0	85	5,320,613,617	85	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,652,230,973	0	1	3,979,057,514	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	4,652,230,973	0	58	3,979,057,514	58	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	142,800,000	0	95	110,000,000	95	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	46,400,000	0	1	30,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	50,000,000	0	5	40,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	46,400,000	0	5	40,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	82	528,776,000	0	82	317,500,000	82	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	70,000,000	0	12	35,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8,000,000	0	12	12,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	0	12	5,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	0	12	30,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	14,400,000	0	12	20,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	0	1	5,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	93	359,176,000	0	93	200,000,000	93	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	0	40	10,500,000	40	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	60,000,000	0	75	232,500,000	75	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	10,000,000	0	5	45,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	5	187,500,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	474,000,000	0	100	436,556,103	100	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan				
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12		15=14/5x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp
5.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000		0	12	12,000,000	12	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	16		
5.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18,000,000		0	12	18,000,000	12	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	450,000,000		0	12	406,556,103	12	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.01.2.08.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	82	210,000,000		0	82	245,000,000	82	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	60,000,000		0	4	75,000,000	4	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.01.2.09.05.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30,000,000		0	5	30,000,000	5	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40,000,000		0	1	40,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persen	84	1,130,000,000		0	84	1,001,000,000	84	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.01.		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	Persen	69	1,080,000,000		0	69	881,000,000	69	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.01.03.		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	120,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	110,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	280,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.01.06.		Penyapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	170	50,000,000		0	170	50,000,000	170	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.01.07.		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditebitkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	520,000,000		0	2	431,000,000	2	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.04.		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Sistem	1	50,000,000		0	1	120,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.04.02.		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	4	50,000,000		0	4	120,000,000	4	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persen	64	680,000,000		0	64	490,000,000	64	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.02.		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterlisan Data Daerah	Persen	90	400,000,000		0	90	250,000,000	90	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.02.01.		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	3	300,000,000		0	3	150,000,000	3	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.02.03.		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.03.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	60	280,000,000		0	60	240,000,000	60	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.02.2.03.03.		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	280,000,000		0	4	240,000,000	4	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	800,000,000		0	93	560,000,000	93	0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
5.01.03.2.01.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	800,000,000	0	93	560,000,000	93	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.01.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	100,000,000	0	8	70,000,000	8	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.01.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	8	100,000,000	0	8	70,000,000	8	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.01.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	100,000,000	0	8	70,000,000	8	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	100,000,000	0	1	70,000,000	1	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.01.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	100,000,000	0	8	70,000,000	8	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.01.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	8	100,000,000	0	8	70,000,000	8	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.01.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	8	100,000,000	0	8	70,000,000	8	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.01.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	100,000,000	0	1	70,000,000	1	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	1.245,000,000	0	93	1.120,000,000	93	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	93	600,000,000	0	93	560,000,000	93	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	75,000,000	0	5	70,000,000	5	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	75,000,000	0	5	70,000,000	5	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	75,000,000	0	5	70,000,000	5	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	75,000,000	0	1	70,000,000	1	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	75,000,000	0	5	70,000,000	5	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	5	75,000,000	0	5	70,000,000	5	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	5	75,000,000	0	5	70,000,000	5	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.02.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	75,000,000	0	1	70,000,000	1	0							0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan				
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12		15=14/5x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp
5.01.03.2.03.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	645,000,000	0	93	560,000,000	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16		
5.01.03.2.03.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	75,000,000	0	3	70,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.01.03.2.03.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3	75,000,000	0	3	70,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.01.03.2.03.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3	75,000,000	0	3	70,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.01.03.2.03.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000	0	3	70,000,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.01.03.2.03.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	75,000,000	0	1	70,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.01.03.2.03.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	1	75,000,000	0	1	70,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.01.03.2.03.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	1	75,000,000	0	1	70,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.01.03.2.03.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	120,000,000	0	1	70,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.05.		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																											
5.05.02.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	55.00	400,000,000	0	55.00	350,000,000	55.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.05.02.2.04.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	400,000,000	0	100	350,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.05.02.2.04.01.		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	150,000,000	0	1	70,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.05.02.2.04.03.		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	250,000,000	0	1	280,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.05.02.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	25	375,000,000	0	25	460,000,000	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.05.02.2.01.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	Persen	100	25,000,000	0	100	50,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.05.02.2.01.12.		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	25,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.05.02.2.02.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persen	100	150,000,000	0	100	150,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.05.02.2.02.03.		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	50,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.05.02.2.02.05.		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	50,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.05.02.2.02.09.		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	50,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.05.02.2.03.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	200,000,000	0	100	260,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.05.02.2.03.01.		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	50,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			

